SKRIPSI

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASANPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESADIDESAPAKMAYAM KECAMATANNGABANG KABUPATEN LANDAK

Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Florentine Piere

NIM. E1051221014

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASANPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESADIDESAPAKMAYAM KECAMATANNGABANG KABUPATEN LANDAK

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana:

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administasi Publik

Oleh:

Florentine Piere

NIM. E1051221014

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PAK MAYAM KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Florentine Piere

NIM E1051221014

Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Bima Sujendra, S.IP, M.Sos
NIP. 198805072014041002

Tanggal 13/8/2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Fuzy Firda Zhan, M.Sos
NIP.199503282022032022

Tanggal: 04-08-2026

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PAK MAYAM KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Oleh:

Florentine Piere
NIM. E1051221014

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 2 September 2026
Waktu : 09.00
Tempat : Ruang Sidang R1

TIM PENGUJI

Ketua

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

Sekretaris

Fuzy Firda Zhan, M.Sos
NIP. 199503282022032022

Penguji Utama

Martinus, S.Sos, M.Si
NIP. 197212272006041002

Penguji Pendamping

Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos
NIP. 199306212022032011

Disahkan Oleh:

Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang intensifnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pak Mayam dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang belum sesuai dengan ketentuan berlaku serta kurangnya pemahaman anggota BPD dalam menjalankan kewenangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif deskriptif* dengan pendekatan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa pak mayam menghadapi beberapa kendala yang bersifat struktural, sumber daya, dan relasional. Contohnya adalah penimbunan jalan di dusun menjalin terlaksana tetapi tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya mekanisme pengendalian terhadap pelaksanaan program, keadaan tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pengawasan yang seharusnya menjadi ranah kerja BPD.

Kata kunci: fungsi pengawasan BPD, pemerintahan desa, Desa Pak Mayam

ABSTRACT

This study was driven by the fact that the Village Consultative Body (BPD) of Pak Mayam Village has not been sufficiently active in optimally carrying out its oversight functions. The main problems identified include the BPD's performance of its duties and functions not being in accordance with applicable regulations, as well as a lack of understanding among BPD members regarding the exercise of their authority. The objective of this study is to identify and analyze the oversight function of the Village Consultative Body (BPD) in the administration of government in Pak Mayam Village, Ngabang Subdistrict, Landak Regency. This study employed a descriptive qualitative method using a purposive sampling approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The results indicate that the BPD's exercise of its oversight functions in the administration of Pak Mayam Village faces several structural, resource-related, and relational obstacles. For example, road grading in Dusun Menjalin was carried out but did not conform to the established plan. This situation highlights the weakness of control mechanisms over program implementation and illustrates a gap between planning and oversight, areas that should fall within the BPD's work domain.

Keywords: BPD oversight functions, village governance, Pak Mayam Village



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak*. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pak Mayam.

Untuk mendeskripsikan tantangan dan hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan proses pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BPD dalam menjalankan proses pengawasan. Teori yang digunakan adalah teori Donnely.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Pak Mayam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan Teknik penelitian lapangan *(Field Research)*, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data yang nyata. Pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD yang sudah dipilih oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD Desa Pak Mayam telah

melakukan fungsi pengawasan melalui kehadiran dalam rapat, berkoordinasi dengan pemerintahan desa, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, jika dianalisis dengan menggunakan teori pengawasan Donnely pelaksanaan pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal pada tiga tahap pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan saat kegiatan berlangsung, dan pengawasan umpan balik. Pada tahap pengawasan pendahuluan BPD belum maksimal dalam memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan sehingga masih ditemukan program seperti peningkatan badan jalan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kemudian pada tahap pengawasan saat kegiatan berlangsung adanya keterbatasan kapasitas manusia, lemahnya komunikasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat yang membuat pengawasan lapangan kurang berjalan efektif. Sementara itu, pada tahap pengawasan umpan balik BPD belum sepenuhnya mampu melakukan evaluasi dan koreksi secara tegas terhadap penyimpangan yang terjadi, hal ini dikarenakan adanya hambatan antara hubungan BPD dengan pemerintahan desa dan ketergantungan terhadap pemerintahan desa. Dengan demikian fungsi pengawasan BPD cenderung hanya bersifat formalitas dan belum menjadi mekanisme kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kesimpulan dari penelitian saya ini BPD Desa Pak Mayam memiliki dinamika yang melemahkan fungsi pengawasan, dominasi Kepala Desa disebut sebagai faktor yang menghambat BPD kesulitan untuk bersikap mandiri dalam menyampaikan kritik, dan juga inisiatif sosialisasi BPD kepada masyarakat dinilai kurang.

Saran untuk BPD dalam menjalan fungsi pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dapat menjadikan sebuah gambaran dalam mengacu kepada sesuatu tindakan yang menjadi lebih baik. Proses ini dapat bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pihak pemerintah desa dan BPD juga masyarakat untuk saling bertukar pikiran demi memajukan desa. Menyelenggarakan Kembali layanan kantor desa secara rutin dan memastikan saluran komunikasi publik terbuka sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi serta dapat berkomunikasi secara efektif.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Florentine piere

Nomor Mahasiswa : E1051221014

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 1 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Florentine piere

Nim. E1051221014

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

"Terjadilah padaku menurut perkataanmu"

(Lukas 1:38)

"kau tidak bisa mengontrol bagaimana hidup akan menjatuhkanmu, tapi kau bisa mengontrol kapan kau harus bangkit"

"Mimpikan, Pikirkan, Lakukan"

(Florentine Piere)

Persembahan:

Puji dan syukur yang selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan serta kelancaran dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini di dalam perguruan tinggi yang saya tempuh untuk mencapai kesuksesan lebih lanjut. Atas kuasaNya skripsi ini dapat saya selesaikan.

Lembar persembahan saya dedikasikan untuk orang tua, saudara, serta

teman-teman perjuangan yang tiada henti memberikan semangat dan dukungan dalam proses mengerjakan tugas akhir hingga pada waktunya, lembar persembahan sebagai bentuk rasa terimakasih saya atas segala dukungan materi dan moril.

1. Orang tua yang saya sayangi, Bapak Florianus Pilar dan ibu Theresia yang telah memberikan dukungan dan doa sepenuh hati serta dukungan untuk kesuksesan saya, baik secara moral dan materi, dan yang selalu mengutamakan keperluan pendidikan dan senantiasa mengerti kondisi peneliti selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Saudara saya Albertus Erik Agung yang selalu memberikan dukungan untuk kesuksesan saya.
3. Keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan saya.
4. Untuk semua kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih karna pernah hadir dari awal hingga akhir pada perjalanan selama proses menempuh pendidikan ini, terimakasih untuk semua kebaikan kalian semua.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Penulisan skripsi ini banyak sekali mendapat masukan, saran serta kritik

yang membangun sehingga sangat membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bima Sujendra, S.IP, M.Si sebagai pembimbing pertama dan ibu Fuzy Firdda Zhan, M.Sos selaku pembimbing pendamping. Terima kasih selama peneliti melakukan bimbingan bapak dan ibu tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran serta memberikan arahan, motivasi, dukungan, dan saran-saran yang sangat membangun bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini. Selain itu, peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Drs. Asmadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
5. Bima Sujendra, S.IP, M.Si sebagai pembimbing utama peneliti yang telah memberikan arahan, bantuan, serta dukungan kepada peneliti dalam Menyusun hasil penelitian dalam skripsi ini.
6. Fuzy Firdda Zhan, M.Sos selaku dosen pembimbing pendamping peneliti yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, bantuan, serta dukungan kepada peneliti dalam menyusun hasil penelitian dalam skripsi ini.
7. Martinus, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji utama yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat membangun terhadap penulisan dan penelitian skripsi yang sudah peneliti susun.
8. Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos selaku dosen penguji pendamping yang

telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat membangun terhadap penulisan dan penelitian skripsi yang sudah peneliti susun.

9. Staf Tata Usaha, Akademik dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
10. Bapak Fajar selaku Kepala Desa Pak Mayam yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan arahan dalam mengumpulkan data pada saat penelitian berlangsung.
11. Bapak Albertus Erik Agung selaku Perangkat Desa Pak Mayam yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan arahan dalam mengumpulkan data pada saat penelitian berlangsung.
12. Bapak Anyon selaku Ketua BPD Desa Pak Mayam yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan arahan dalam mengumpulkan data pada saat penelitian berlangsung.
13. Bapak Paran selaku Anggota BPD yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan arahan dalam mengumpulkan data pada saat penelitian berlangsung.
14. Bapak Herkulanus Dampo selaku Kepala Dusun yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan arahan dalam mengumpulkan data pada saat penelitian berlangsung.
15. Bapak Raymondo selaku masyarakat Desa Pak Mayam yang telah memberikan data dan informasi pendukung yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu nama mereka yang telah memberikan semangat kepada saya dan selalu memberi

dukungan yang tulus kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan baik dari segi teknis maupun segi substansi. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Pontianak, 1 Juli 2026

Florentine Piere
E1051221014

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACK ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN ..... **xvii**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 9
1.3. Fokus Penelitian 9
1.4. Rumusan Masalah 9
1.5. Tujuan Penelitian 10
1.6. Manfaat Penelitian 10
1.6.1. Manfaat Teoretis 10
1.6.2. Manfaat Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1 Definisi Konsep 12
2.1.1 Pengawasan 12
2.1.2 Badan Permusyawaratan Desa 13
2.1.3 Kepala Desa 20
2.1.4 Hubungan Kerja Sama Antara BPD dan Pemerintah Desa 25
2.2. Teori 30
2.2.1 Teori Pengawasan 30
2.2.2 Fungsi Pengawasan 34
2.2.3 Jenis-Jenis Pengawasan 35

2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 37
2.4. Alur Pikir Penelitian 40
2.5 Pertanyaan Penelitian 42
BAB III METODE PENELITIAN 44
3.1. Jenis Penelitian 44
3.2. Langkah-langkah Penelitian 44
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 45
3.3.1 Lokasi Penelitian 46
3.3.2 Waktu Penelitian 46
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 48
3.4.1 Subjek Penelitian 48
3.4.2. Objek Penelitian 49
3.5. Teknik Pengumpulan Data 50
3.5.1 Wawancara 50
3.5.2 Dokumentasi 51
3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data 51
3.7. Teknik Keabsahan Data 52
BAB IV GAMBARAN UMUM 54
4.1 Profil Wilayah Desa Pak Mayam 54
4.2 Kondisi Geografis Desa Pak Mayam 55
4.3 Kondisi Sosial Budaya Desa 57
4.4 Struktur Organisasi 59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61
5.1 Temuan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 61
5.2 Analisis Dengan Teori Pengawasan Donnely 64
BAB VI PENUTUP 70
6.1 Kesimpulan 70
6.2 Saran 71
6.3 Keterbatasan Penelitian 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN-LAMPIRAN 86

DAFTAR TEBEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian **48**
Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa.....**55**
Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa **56**
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....**57**
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian **58**
Tabel 4.4 Nama Anggota BPD **60**
Tabel 4.3 Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa **59**
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama..... **59**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penimbunan Jalan Di Dusun Menjalin 3

Gambar 1.2 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) 4

Gambar 1.3 Dokumentasi Pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa 6

Gambar 2.3 Alur Pikir Peneliti 41

Gambar 4.2 Lokasi Wilayah Desa **56**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan politik terkecil dalam struktur negara Indonesia yang menjadi ujung tombak pelaksanaan demokrasi lokal (Endah, 2018: 76-82). Desa tidak hanya dipahami sebagai entitas administratif, melainkan juga sebagai arena politik tempat berlangsungnya praktik kekuasaan, representasi, dan partisipasi rakyat (Firmansyah & Ahmad 2025, 18). Sebagaimana ditegaskan oleh Robert A. Dahl, (Turmudi, 2024: 223-239), demokrasi yang ideal harus membuka ruang bagi warga untuk berpartisipasi efektif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Dalam konteks ini, desa adalah "ruang demokrasi paling dekat dengan rakyat", sehingga nilai-nilai partisipatif dan akuntabilitas politik diuji secara nyata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, pemerintah desa memiliki fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa secara teratur, trasparan, serta mengutamakan kepentingan warga desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa, menyampaikan aspirasi, membahas rencana pembangunan desa, serta pengawasan dan pengendalian.

Selain menjalankan fungsi representasi, BPD juga memiliki peran pengawasan politik terhadap Kepala Desa (Pradema, 2025). Larry Diamond menyatakan bahwa akuntabilitas politik merupakan elemen utama demokrasi, di mana lembaga

perwakilan rakyat berfungsi mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan (Larry Diamond-Rahim, 2025). Fungsi pengawasan BPD mencerminkan prinsip akuntabilitas horizontal, yaitu mekanisme pengendalian kekuasaan oleh lembaga politik yang sejajar, bukan hanya oleh rakyat secara vertikal melalui pemilu (Fadilah, 2025).

Dalam konteks desa, aturan spesifik BPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2018 Tentang BPD dan diperkuat UUD Nomor 3 Tahun 2024 pasal 16-18 dalam praktiknya, fungsi dan tugas BPD di tingkat desa meliputi beberapa aspek penting (Pradema, 2025). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan patner bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Afriansyah, 2024). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak sebagai mitra bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan, Kedudukan sebagai mitra pemerintah Desa menyebabkan diantara keduanya tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, sehingga dalam peraturan telah diatur bahwa walaupun Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa tetapi BPD tidak dapat secara langsung memberhentikan Kepala Desa, Karena keduanya memiliki posisi sejajar sebagai mitra, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Namun, praktik demokrasi lokal tidak selalu berjalan ideal. Dalam pelaksanaannya, BPD di berbagai daerah, termasuk di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, masih menghadapi sejumlah persoalan politik dan kelembagaan. Berdasarkan observasi awal, terdapat tiga isu utama.

Lemahnya efektivitas pengawasan terhadap pembangunan desa menjadi salah satu celah utama yang mengakibatkan program-program fisik di lapangan tidak berjalan dengan optimal. Tanpa adanya kontrol yang ketat dan berkala dari pihak berwenang maupun masyarakat, proyek infrastruktur seperti penimbunan jalan sering kali dikerjakan secara asal-asalan atau bahkan menyimpang dari rencana anggaran yang telah ditentukan. Kurangnya pemantauan langsung ini membuat penyimpangan dan pengerjaan tidak terdeteksi sejak dini. Kondisi nyata di lapangan seperti yang terlihat jelas pada foto bukti berikut menunjukkan kondisi peningkatan badan jalan yang tidak sesuai dan berpotensi menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Bagaimana lemahnya pengawasan tersebut akhirnya menghasilkan proyek yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Salah satu contoh pembangunan fisik yang dapat diambil adalah gambar peninbunan jalan

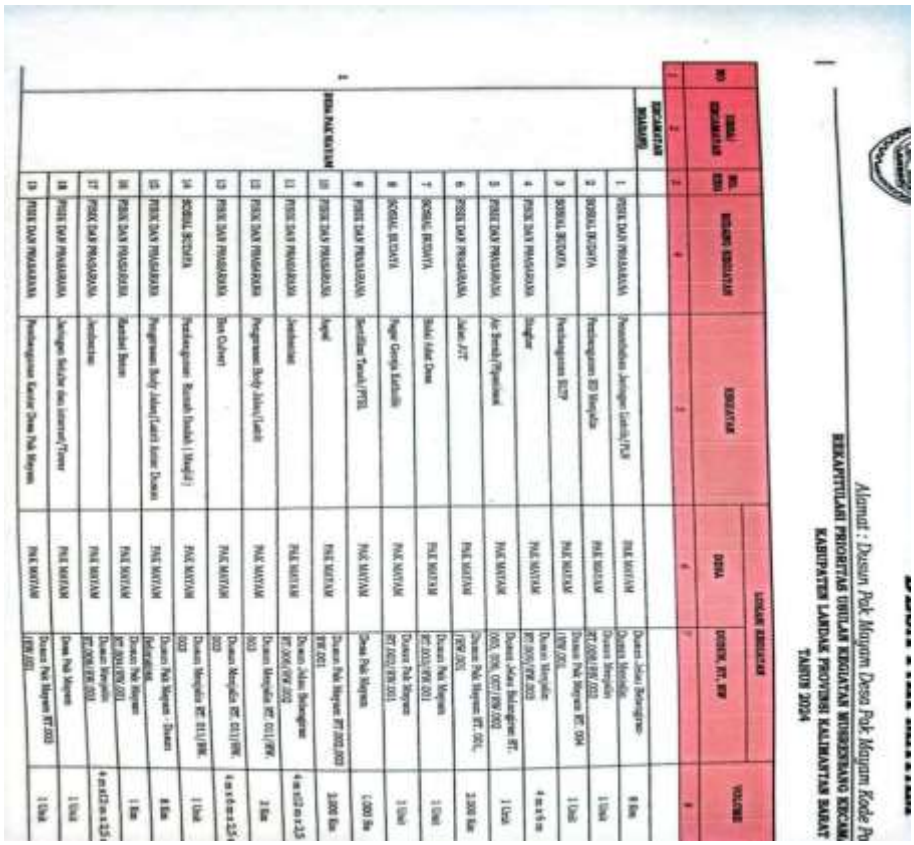
Gambar 1.1 Penimbunan Jalan Di Dusun Menjalin



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Faktor lain yang membuat masalah ini menjadi rumit adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku, terutama dalam hal pengawasan penganggaran. Hal ini berakar dari kurangnya pemahaman anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga mereka cenderung bersikap pasif dan hanya formalitas saat menyetujui program kerja. Kelemahan kompetensi tersebut berdampak langsung pada proses perencanaan tata kelola desa yang tidak sinkron dan melenceng dari regulasi. Ketidakmampuan BPD dalam mengoreksi penyusunan anggaran ini terbukti nyata dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) seperti yang ditunjukkan pada foto berikut ini.

Gambar 1.2 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES)



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2025

`Program desa yang sedang berjalan saat ini yakni peningkatan badan jalan yang berada di Dusun Menjalin, Pembangunan yang paling di harapkan masyarakat yaitu adanya perbaikan akses jalan yang memadai menuju kota, karena di setiap dusun yang ada di desa pak mayam akses jalan menuju kota kurang diperhatikan. Pengerasan badan jalan yang seharusnya di usulkan sepanjang 3 km namun hanya terlaksana sepanjang 1,5 km. Selain dari pada itu, peningkatan badan jalan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat setempat, ketidakpuasan dari masyarakat ini adalah dikarenakan peningkatan badan jalan yang berada di Dusun Menjalin sampai pada saat ini belum terselesaikan sehingga membuat aktivitas dan kegiatan warga setempat masih terhambat dan terkendala.

Kurangnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proyek pengerasan body jalan di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak menjadi persoalan penting yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan infrastruktur tersebut. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menunjukan ketidaksesuaian antara target pembangunan dan yang terealisasi di lapangan serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelemahan dalam fungsi pengawasan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan BPD, kurangnya pemahaman mengenai aspek teknis pembangunan, serta tidak tersedianya mekanisme kontrol yang memadai dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan (Leswara & Rahmah, 2024: 94-112). Akibat dari lemahnya pengawasan tersebut tidak semua proyek dapat di pantau dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti mutu yang rendah, kemungkinan

penyimpangan dari rencana pembangunan, dan tidak sesuai hasil pembangunan dengan rencana teknis yang telah disusun sebelumnya (Maulana & Harisman, 2024). Situasi ini dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan proyek serta mengurangi manfaat sosial dan ekonomi yang seharusnya di rasakan oleh masyarakat desa (Meutia & Sukmana, 2024).

Kondisi politik di Desa Pak Mayam memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan ruang bagi partisipasi dan pengawasan, praktik di lapangan masih menghadapi kendala. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa relatif rendah, yang berdampak pada terbatasnya masukan terhadap kebijakan publik. Di sisi lain, kapasitas anggota BPD yang beragam membuat fungsi pengawasan sering kali berjalan kurang optimal. Faktor lain seperti keterbatasan dana, rendahnya pendidikan politik, serta budaya birokratis turut memperlemah daya tawar BPD dalam politik lokal (Tohawi, 2025: 92).

Berikut adalah gambar bukti pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Pak Mayam.

Gambar 1.3 Dokumentasi Pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2025

Dengan meninjau fungsi BPD di Desa Pak Mayam dari perspektif Ilmu Politik, penelitian ini berupaya memahami dinamika kekuasaan, representasi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD tidak hanya menjadi bagian dari struktur pemerintahan, tetapi juga arena politik tempat berbagai kepentingan sosial-ekonomi berinteraksi (Tohawi, 2025: 92-120). Pada gambar tersebut menunjukan bahwa BPD telah melakukan pengawasan pada proses penimbunan badan jalan di Dusun Menjalin, namun pengawasan yang dilakukan tersebut hanya dilakukan ketika tim pengawas dari kecamatan turun di lapangan untuk mengecek langsung sudah sejauhmana penimbunan tersebut berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Desa Pak Mayam belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari belum adanya penilaian yang mendalam terhadap kesesuaian antara program yang tercantum dalam RKPDes dan hasil pelaksanaannya di lapangan. Program peningkatan badan jalan di Dusun Menjalin, misalnya, direncanakan dengan target pengerasan sepanjang 3 kilometer, tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sekitar 1,5 kilometer dan belum terselesaikan secara keseluruhan. Ketidaksesuaian tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam evaluasi BPD karena berkaitan dengan capaian pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, evaluasi yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menghasilkan tindakan korektif terhadap program yang tidak sesuai dengan perencanaan. BPD belum secara maksimal menggunakan hasil evaluasi untuk meminta keterangan, menyatakan pendapat, atau memberikan rekomendasi

perbaikan kepada Kepala Desa. Keadaan ini menunjukkan bahwa evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang dapat menghubungkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa.

Namun, dalam pelaksanaan fungsi tersebut BPD menghadapi berbagai tantangan, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, minimnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban, serta keterbatasan dana yang menghambat efektivitas pengawasan (Naufal & Rahman, 2025). Kondisi tersebut tercermin dari hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di mana program peningkatan badan jalan di Dusun Menjalin yang direncanakan dalam RKPDes dengan target pengerasan sepanjang 3 kilometer hanya terealisasi sekitar 1,5 kilometer dan belum terselesaikan secara menyeluruh. Ketidaksesuaian antara target perencanaan dan realisasi di lapangan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD belum sepenuhnya mampu mengoreksi penyimpangan pelaksanaan program, meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah memberikan kerangka hukum yang kuat. Oleh karena itu, implementasi fungsi pengawasan BPD di lapangan masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam memperkuat kapasitas anggota BPD, memperjelas mekanisme evaluasi LKPPD, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan fungsi BPD di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, serta

mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi BPD berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di identifiksi masalahnya sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa khususnya program peningkatan badan jalan di Dusun Menjalin tidak berjalan secara optimal/pengawasan dilakukan hanya fokus pada formalitas.
2. Pengawasan BPD pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa (RKPDes) kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
3. Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan, tidak adanya jadwal mekanisme pengawasan yang jelas, serta partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pengawasan.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini perlu adanya fokus penelitian, yaitu terkait fungsi BPD dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

1.4. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dalam penelitian maka berdasarkan uraian diatas, penulis berusaha merumuskan masalahnya sebagai

berikut: bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa penambahan wawasan bagi pembaca di lingkungan kampus khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi penulis dan maupun pembaca dalam mengembangkan pemahaman mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Untuk BPD Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menampung aspirasi masyarakat.
b. Untuk Masyarakat Desa Pak Mayam, dapat dijadikan acuan untuk evaluasi kedepannya tentang bagaimana fungsi BPD kedepannya terutama dalam menjalankan tugasnya.